TWK UUD & sejarah NKRI

Sebelum dilakukan amandemen
→ 16 BAB, 37 pasal, 65 ayat

Setelah dilakukan 4 kali amandemen
→ 16 BAB, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan,
2 pasal aturan tambahan

UUD 1945 sah → 18 Agustus 1945 o/ PPKI

Perancang UUD 1945 → BPUPKI

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia) → 29 April 1945

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia]
↳ 7 Agustus 1945 diketuai Ir. Soekarno (21 anggota)

22 Juni 1945 → 38 anggota BPUPKI membentuk panitia sembilan (9 org) u/ merancang piagam jakarta

16 Oktober 1945 → kekuasaan legislatif diserahkan ke KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) karena MPR & DPR belum terbentuk

14 November 1945 → dibentuk kabinet pertama Kabinet Semi Presidensial (Semi - Parlementer)

UUDS 1950 (17 Agt 1950 - 5 Juli 1959) → Demokrasi Parlementer / Liberal

Orde baru (1966 - 1998) → kekuasaan tertinggi di tangan MPR → kekuasaan terbesar Presiden

#
- Amandemen I = 19 Okt 1999
- Amandemen II = 18 Agt 2000
- Amandemen III = 10 Nov 2001
- Amandemen IV = 10 Agt 2002

Pemerintah Indonesia
- Legislatif (MPR, DPR, DPD)
- Eksekutif (Presiden RI)
- Yudikatif (Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi)

Asas dlm perundang - undangan
- Asas Legalitas
- Asas lex superior derogat legi inferior
- Asas lex specialis derogat legi generali
- Asas lex posterior derogat legi priori

Sidang² PPKI
1. 18 Agustus 1945
   - Mengesahkan UUD 1945
   - Memilih & mengangkat Soekarno - Hatta menjadi Presiden & wapres
   - Tugas presiden sementara dibantu KNIP
2. 19 Agustus 1945
   - Membentuk 12 kementerian & 4 menteri negara
   - Membentuk pemerintahan daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yg dipimpin o/ gubernur

BPUPKI → 67 anggota diketuai o/ Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat

Sidang² BPUPKI
1. 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945
   ↳ mengenai rumusan 5 sila dasar RI yg dikenal dengan Pancasila (1 Juni 1945)
2. 10 - 17 Juli 1945
   ↳ membahas mengenai rancangan UUD, wilayah NKRI, ekonomi, pembelaan negara

Jepang menyerah kepada Amerika Serikat
6 Agt 1945 → bom atom jatuh di kota Hirosima
9 Agt 1945 → bom atom jatuh di kota Nagasaki

Rumah Laksamana Muda Maeda → (Gedung museum perumusan teks proklamasi)

Pembacaan teks proklamasi → Jln. Pegangsaan Timur 56 (Skrg Jl. Proklamasi no. 1)

Penyusun teks proklamasi
- Ir. Soekarno
- Moh. Hatta
- Ahmad Soebarjo

Pengusulan penandatanganan teks proklamasi
→ Sukarni

Yang mengetik teks proklamasi
→ Sayuti Melik

Orde Lama → Masa pemerintahan Soekarno → th 1945 - 1967

Orde baru → Masa pemerintahan Soeharto → diawali dgn Supersemar → 1966 - 1998

Era Reformasi → Masa pemerintahan BJ Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati → 1998 - 2001

Ketua MPR = Zulkifli Hasan
Ketua DPR = Bambang Soesatyo
Ketua DPD = Oesman Sapta Odang
} saat ini

PETA (Pembela tanah air) → 3 oktober 1943

Harian Suara Asia → surat kabar yg pertama kali memuat berita proklamasi

Kantor berita Domei (Antara) → yg pertama kali menyiarkan proklamasi

Utusan PPKI yg ikut menyebarkan berita proklamasi
1. Teuku Mohammad Hassan (Aceh)
2. Sam Ratulangi (Sulawesi)
3. Ketut Pudja (Bali)
4. A.A Hamidan (Kalimantan)

TWK NKRI

Indonesia terletak antara :
- benua Asia & Australia
- Samudra Pasifik & Samudra Hindia

Indonesia → negara kepulauan terbesar di dunia → 17.504 pulau

Populasi Indonesia → 270.054.053 th 2018
→ Negara berpenduduk terbesar ke-4
→ Berpenduduk muslim terbesar

Penjajahan belanda → 3 abad
—— // —— jepang → 3,5 tahun

Kerajaan yg ada di Indonesia
- Kerajaan Kutai → Hindu pertama → th 400 m → Kaltim → Raja Kudungga
- Kerajaan Perlak → Islam pertama → th 840 m → Aceh timur → Raja Sultan Alaiddin Syeh Maulana Abdul Aziz Syah

PBB → kerjasama Internasional → berdiri 24 oktober 1945
Indonesia bergabung dgn PBB → 28 Sept 1950
Kemudian keluar dari PBB → 7 Jan 1965
Bergabung kembali → 28 Sept 1966

Indonesia → 34 provinsi
98 kota
416 kabupaten
Letak Indonesia 6° LU - 11° 08' LS dan 95° BT - 141° 45' BT
Luas daratan Indonesia = 1.922.570 km²
Luas perairannya = 3.257.483 km²
Batas wilayah → territorial laut 12 mil laut
Zona ekonomi eksklusif 200 mil laut

TWK G30S PKI

Kejadian 30 September 1965
Ketua PKI → DN Aidit
Korban
- Letjen Ahmad Yani (Staf Komando operasi tertinggi)
- Mayjen R. Suprapto (Panglima AD bid. Administrasi)
- Mayjen M.T Haryono (Panglima AD bid. Perencanaan & Pembinaan)
- Mayjen S. Parman (Panglima AD bid. Intelijen)
- Brigjen D.I Panjaitan (Panglima AD bid. logistik)
- Brigjen Sutoyo S

01 Oktober → Kesaktian Pancasila
01 Juni → Lahirnya Pancasila.

TWK Sumpah Pemuda

Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin, dibacakan o/ Soegondo
Hari Sumpah Pemuda ditetapkan tgl 28 Oktober 1959 ditetapkan melalui Keppres no. 316 th 1959

TWK UU RI

1. UU RI No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
2. UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. TAP MPRS no. XX/MPRS/1966 tentang Pancasila sbg sumber dari segala sumber hukum

TWK Budi Oetomo

\# Didirikan o/ dr. Soetomo & para mhs STOVIA → 20 Mei 1908 → digagaskan o/ Dr. Wahidin Sudirohusodo

\# Berdirinya Budi Utomo dikenal sbg Hari Kebangkitan Nasional → 20 Mei

\# Ki Hadjar Dewantara (Rd. Mas Soewardi Soerjaningrat) adalah Pendiri Taman Siswa → 3 Juli 1922

\# Hari lahirnya KHD diperingati sbg hari pendidikan nasional yaitu 2 Mei 1889

\# Indische Partij → 25 Desember 1912 → didirikan o/ tiga Serangkai yaitu Douwes Dekker (→ Danudirja Setiabudi), Cipto Mangunkusumo, Ki Hadjar Dewantara

TWK Lambang negara & Pancasila

\# Lambang negara → Garuda → dirancang o/ Sultan Hamid II dari Pontianak → digunakan pertama kali saat sidang kabinet RIS 11 Feb 1950

\# PP No. 43 th 1958 ttg penggunaan lambang negara

\# Burung Garuda menggambarkan bangsa yg besar & negara yg kuat

\# Warna Keemasan melambangkan keagungan & kejayaan

\# Garuda memiliki paruh, sayap, ekor & cakar melambangkan kekuatan & tenaga pembangunan

\# Jumlah bulu :

17 helai bulu pada masing² sayap
8 helai bulu pada ekor
19 helai bulu di bawah perisai / pangkal ekor
45 helai bulu di leher

\# - Sila Pertama : Ketuhanan yang maha esa (bintang sudut 5)

- Sila Kedua : Kemanusiaan yg adil & beradab (tali rantai bulat 9/pr & rantai perseg 8/LK)

- Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
(Pohon beringin)
- Sila Keempat : Kerakyatan yg dipimpin o/ hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan / perwakilan
(Kepala Banteng)
- Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Kapas & padi) 17 padi 5 kapas

Tokoh yg merumuskan Pancasila
1. Ir. Soekarno (01/06)
2. M. Hatta
3. Soepomo (31/05)
4. Mohammad Yamin (29/05)
5. K.H Abdul Wachid Hasyim

Diambil dari kitab → Negarakertagama
Ditulis o/ → Empu Prapanca
Pencetus → M. Yamin

TWK Otonomi daerah

Otonomi → Autos → Sendiri
→ Nomos → Aturan / undang²
Daerah → Kesatuan masyarakat hukum yg mempunyai batas² wilayah

Otonomi daerah → hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom u/ mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat sesuai dgn peraturan perundang²an.

Asas Desentralisasi → Pemberian wewenang o/ pemerintah pusat kpd pemerintah daerah u/ mengurus urusan daerahnya sendiri

Asas Dekonsentrasi → Pelimpahan wewenang o/ pemerintah pusat kpd alat² kelengkapan pemerintah pusat yg berada di daerah u/ menyelenggarakan urusan tertentu

Tugas Pembantuan → Penugasan sebagian urusan pemerintah pusat / pemerintah daerah provinsi kpd daerah kab / kota u/ melaksanakan sebagian urusan yg

TWK UUD 1945

UUD 1945 → hukum dasar tertulis
- ↳ Pembukaan
- ↳ Batang tubuh
- ↳ Penjelasan

Isi UUD 1945
- → dasar negara / pandangan hidup bangsa
- → aturan² pokok
- → cita² luhur pancasila

UUD 1945 meliputi 4 alinea
Alinea I → HAM tentang kemerdekaan

Alinea II → Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia

Alinea III → Pernyataan kemerdekaan Indonesia

Alinea IV → Negara RI serta rumusan Pancasila

Tujuan negara dlm UUD 1945 alinea IV
- Melindungi segenap bangsa Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia

BAB I → bentuk negara → pasal 1, 3 ayat
BAB II → MPR → Pasal 2, 3 ayat & pasal 3, 3 ayat
BAB III → Kekuasaan pemerintahan → pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
BAB IV → Dewan pertimbangan → pasal 16
BAB V → Kementerian Negara → pasal 17
BAB VI → Pemerintah daerah → pasal 18, 18A, 18B
BAB VII → Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) → pasal 19, 20, 20 A, 21, 22, 22A, 22 B
BAB VII A → Dewan Perwakilan Daerah (DPD) → pasal 22C, 22 D
BAB VIIB → Pemilihan umum → pasal 22 E
BAB VIII → Hal Keuangan → pasal 23, 23A, 23 B, 23 C, 23 D
BAB VIII A → Badan Pemeriksa Keuangan → pasal 23 E, 23 F, 23 G
BAB IX → Kekuasaan Kehakiman → pasal 24, 24A, 24 B, 24 C, 25
BAB IX A → Wilayah negara → pasal 25 A
BAB X → Warga negara & penduduk → pasal 26, 27, 28

BAB XA → HAM → pasal 28A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 28 J
BAB XI → Agama → pasal 29
BAB XII → Pertahanan & Keamanan negara → Pasal 30
BAB XIII → Pendidikan & kebudayaan → pasal 31, 32
BAB XIV → Perekonomian Nasional & Kesejahteraan Sosial → pasal 33, 34
BAB XV → Bendera, Bahasa, Lambang negara, & lagu kebangsaan → pasal 35, 36, 36 A, 36 B, 36 C
BAB XVI → Perubahan UUD → pasal 37

Penggunaan Bendera

		P	x	L
1.)	Di lapangan Istana Kepresidenan	= 300	x	200
2.)	Di lapangan Umum	= 180	x	120
3.)	Di ruangan	= 150	x	100
4.)	Di Mobil presiden & wapres	= 54	x	36
5.)	Di Mobil pejabat negara	= 45	x	30
6.)	Di Kendaraan Umum	= 30	x	20
7.)	Di Kapal & kereta Api	= 150	x	100
8.)	Di Pesawat Udara	= 45	x	30
9.)	Di Meja	= 15	x	10

TWK Bhineka Tunggal Ika

// Diambil dari → kitab Sutasoma
Ditulis oleh → Empu Tantular (kerajaan majapahit)
Pencetus → Muh. Yamin
Diresmikan → 17 Agustus 1950

HAK Presiden

Grasi → tindakan meniadakan hukuman yg telah diputuskan o/ hakim kpd seseorang

Rehabilitasi → tindakan mengembalikan hak seseorang yg telah hilang karena suatu keputusan hakim yg ternyata dlm waktu berikutnya terbukti tidak bersalah

Amnesti → Suatu pernyataan terhadap org banyak yg terlibat dlm suatu tindak pidana u/ meniadakan suatu akibat hukum pidana yg timbul dari tindak pidana tsb.

Abolisi → Merupakan suatu keputusan u/ menghentikan pengusutan & pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tsb.

TWK Sejarah

Organisasi Pergerakan Nasional

- Budi Utomo → Wahidin Sudirohusodo
- Serikat Dagang Islam → Hj. Samanhudi
- Serikat Islam → Hos Cokroaminoto
- Perhimpunan Indonesia → Moh. Hatta
- Partai Nasional Indonesia → Ir. Soekarno
- Parindra → Soetomo

Perjanjian Linggar Jati (Perundingan Ind - Blnd)

→ 25 Maret 1947

Perwakilan Indonesia → Sutan Syahrir

Hasil perundingan :

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera, Madura
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tgl 1 jan 1949
3. Pihak Belanda & Indonesia sepakat membentuk negara RIS
4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth / Persemakmuran Indonesia Beland

NICA (Netherlands - Indies Civil Administration)
↳ tentara sekutu yg memiliki / mempunyai tugas u/ mengontrol daerah ² yg berada di hindia belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pd perang dunia II pd tgl 14 Agst 1945. Sewaktu NICA datang mereka menumpang sekutu.

AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)
↳ pasukan yg dikirim ke Indonesia setelah Selesainya perang dunia ke II, u/ melucuti Persenjataan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang jepang, dan mengembalikan Indonesia menjadi Hindia Belanda.

Perjanjian Renville (perjanjian Ind - Blnd)
↳ 17 Januari 1948 di atas gledak kapal perang AS sbg tempat netral USS renville.

KTN (Komisi Tiga Negara)
- Amerika Serikat
- Australia
- Belgia

Dari Indonesia dipimpin o/ Amir Syarifuddin Harahap

Isi Perjanjian :

1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, Sumatera sbg bagian wilayah RI
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yg memisahkan wilayah Indonesia & daerah belanda. (Garis Van Mook)
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah ² kantong nya di wilayah Jawa barat & Jawa Timur.

Lanjutan UUD ....

Pasal 33 ayat 2 → cabang² produksi yg penting dikuasai negara

Pasal 33 ayat 3 → air & kekayaan alam semua dikuasai negara U/ kemakmuran rakyat

Pasal 34 ayat 1 → fakir miskin & anak² terlantar dipelihara negara

Pasal 35, 36 ABC → Bendera, bahasa, lambang & lagu RI

Pasal 37 → Perubahan UU

Hukum

Ius constitutum → hukum yg berlaku saat ini / hukum yg telah ditetapkan (hukum positif)

Ius constituendum → hukum yg dicita² kan / yg diangan² kan di masa mendatang

Perang Dunia

Perang Dunia I (1914 - 1918)

- Penyebab :
  1. Terjadinya pertentangan antar negara
  2. Timbulnya gerakan nasionalisme di berbagai negara
  3. Terjadinya perlombaan senjata
  4. Munculnya persekutuan politik
- Blok Sentral → Jerman, Austria-Hongaria, Bulgaria, Turki
- Blok Sekutu → AS, Perancis, Inggris, Rusia, Italia, Jepang, Rumania, Serbia, Yunani, Portugal, Belgia, Mesir

Perang Dunia II (1939 - 1945)

- Penyebab : Jepang menyerbu pangkalan perang AS di Pearl Harbour pd 7 Des 1941. Sedangkan pd front eropa, adalah karena Jerman menyerbu Pol...

ʊ Blok Axis / Poros = Jerman , Jepang , Italia

Atlantik Charter (Piagam Atlantik)

↳ 14 Agt 1941

Merupakan hasil pertemuan Presiden AS F.D Roosevelt dgn Perdana Mentri Inggris Winston Churchill di kapal Augusta di Samudra Atlantik pelabuhan New foundland / Teluk Placentia.

Isi Piagam Atlantik :

1. Tidak dibenarkan adanya perluasan wilayah
2. Segala bangsa berhak menentukan bentuk & corak pemerintahannya
3. Semua negara berhak atas perdagangan dunia
4. Menolak jalan kekerasan dlm penyelesaian perselisihan Internasional
5. Mengupayakan perdamaian dunia

Pasal 1 → bentuk & Kedaulatan negara Indonesia kedaulatan di tangan rakyat

Pasal 2 - 3 → MPR

Pasal 4 - 16 → Kekuasaan pemerintah

Pasal 17 → Kementrian negara

Pasal 18 A & 18 B → Pemerintah daerah

Pasal 19, 22, 22A, 22 B → DPR

Pasal 22C & 22 D → DPD

Pasal 22 E → Pemilihan Umum

Pasal 23 ABCD → Hal Keuangan

Pasal 23 EFG → BPK

Pasal 24 & 25 → kekuasaan kehakiman

Pasal 25 A → wilayah negara RI negara kepulauan nusantar

Pasal 26, 27 & 28 → Penduduk

Pasal 27 ayat 2 → hidup & kerja yg layak

Pasal 28 → bebas berpendapat

Pasal 28 ABC → HAM

Pasal 29 → Agama

Pasal 30 → Keamanan negara

Pasal 31 & 32 → Pendidikan & Kebudayaan

TWK lanjutan Pancasila

// Panitia Sembilan

1. Soekarno
2. Moh. Hatta
3. Ahmad Soebardjo
4. Muhammad Yamin
5. A.A Maramis
6. H. Agoes Salim
7. KH. A. Wahid Hasyim
8. Abikusno Tjokrosuyoso
9. Abdoel Kahar Muzzakir

// Pancasila Sbg Paradigma

1. Cita² bangsa Indonesia
2. Jiwa bangsa
3. Moral pembangunan
4. Dasar negara RI

Sila² yg tdk diamandemen

4, 10, 12, 29, 35